

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik di sebuah negara adalah proses penting yang melibatkan interaksi antara warga negara dan pemerintah. Pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh institusi birokrasi publik untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemerintah memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan, sehingga memiliki kewajiban melayani masyarakatnya (Bazarah et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah bagian penting dari tugas negara untuk memenuhi hak dasar warga dan menjaga kesejahteraan sosial. Pelayanan publik tidak hanya menyediakan jasa administratif, tetapi juga menciptakan *public value* (nilai publik) bagi masyarakat dengan meningkatkan kepercayaan, partisipasi, dan kepuasan. Oleh sebab itu, pengelolaan pelayanan publik harus berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas agar kebijakan dan program dapat berdampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Rizalihadi et al., 2025). Konsep nilai publik menawarkan cara baru terkait peran pemerintah dan kebijakan. Antara tahun 1995–2022, terdapat 2.993 dokumen di data *Scopus* yang membahas "*public value*". Teori ini terus berkembang bersamaan dengan banyak

penelitian lainnya. Selain itu, penelitian tentang *public value* mengalami stagnasi dan perluasan makna terkait dengan pengelola publik juga dengan organisasi publik, pembuat kebijakan, masyarakat, dan berbagai bidang yang memiliki konsensus tentang nilai-nilai publik. Studi juga membahas penciptaan nilai publik melalui inovasi dan teknologi komunikasi, seperti *e-government*, *smart city* dan platform digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dapat mencapai *public value* dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam kerangka kerja penciptaan bersama untuk inovasi, pelayanan, dan kebijakan publik (Widiono et al., 2024).

Sebagai langkah nyata dalam menciptakan *public value* dalam bentuk pelayanan, sektor kesehatan menjadi salah satu aspek penting yang secara langsung berpengaruh pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara yang memerlukan adanya sistem yang mengatur pelaksanaannya. Hal ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat tetap hidup dengan sehat. Selain itu, layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar lainnya, selain dari pangan dan pendidikan yang berkualitas fokus pada kebutuhan, harapan dan nilai-nilai pasien agar dapat memberikan kepuasan pelayanan (Romadon et al., 2024). Namun, berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan 2024 (2025), terdapat beberapa kendala di Indonesia yakni, perbedaan target penerima layanan, penurunan pendapatan masyarakat, rendahnya minat tenaga kesehatan di wilayah tertentu, permasalahan distribusi sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi

lintas sektor. Sejalan dengan studi oleh Karunia et al. (2024), yang menyatakan bahwa tantangan yang paling sering muncul dalam pelayanan kesehatan ialah, parameter fasilitas fisik/pegawai tenaga kesehatan dan pemenuhan fasilitas yang sangat mempengaruhi penilaian kualitas pada pelayanan kesehatan.

Kualitas masyarakat di suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan, yang berdampak terhadap produktivitas dan kemampuan bersaing di tingkat nasional. Salah satu permasalahan kesehatan yang masih menjadi tantangan besar adalah stunting, yaitu masalah pada pertumbuhan yang disebabkan oleh kurangnya gizi yang cukup dalam 1.000 hari pertama kehidupan (Tambora & Hutasoit, 2025). Angka prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan penurunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023, dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Indonesia kini dalam kategori prevalensi stunting tinggi, mendekati sedang (Tim Percepatan Penurunan Stunting-Setwapres, 2024).



Gambar 1.1Tingkat Prevalensi Stunting di Indonesia
Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)

Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 di atas, menunjukkan pencapaian penurunan stunting di Indonesia selama lima tahun terakhir, selama kurun waktu 2019-2024. Data ini menunjukkan penurunan angka stunting dan kemajuan di tingkat nasional. Prevalensi stunting secara bertahap menurun dari mencapai angka 27,7% pada 2019, menjadi 21,5% pada 2023 dan hingga

menginjak 19,8% pada 2024. Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dalam berita kemkes.go.id tahun 2025, sebagai berikut:

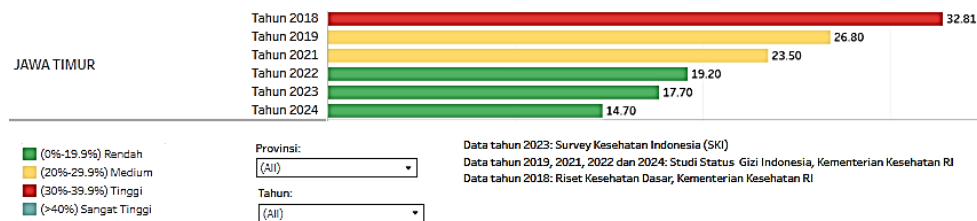
kemkes.go.id – “Survei nasional yang menjadi rujukan utama dalam percepatan penurunan stunting. Prevalensi stunting nasional, dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024. Target kita tahun lalu adalah 20,1%, dan Alhamdulillah hasil survei menunjukkan 19,8%. Artinya, kita berhasil melampaui target. Komitmen kuat pemerintah untuk menurunkan angka stunting nasional menjadi 14,2% pada 2029, sesuai target RPJMN. Target ini tidak mudah, tapi cukup menantang untuk dikejar dalam lima tahun” (Sumber : <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198> (diakses pada 6 November 2025))

Berdasarkan pernyataan di atas, menunjukkan bahwa permasalahan stunting masih menjadi sorotan yang kompleks dan menjadi sasaran indikator prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Terurai dengan target 18,8% pada 2025 dan 14,2% di tahun 2029. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa meskipun menurun, masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang menuntut upaya dan kolaborasi lebih intensif. Mengingat pelayanan kesehatan nasional yang bervariasi dan dinamis dapat memengaruhi kualitas layanan, sehingga diperlukan langkah sistematis untuk meningkatkan tata kelola dan sistem pelayanan untuk akses yang lebih baik serta berkualitas, sehingga hak dasar kesehatan dapat terpenuhi. Sebagaimana sejalan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk hidup dengan baik, sehat dan sejahtera dalam tujuan nasional melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur masalah stunting di Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 72

Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting yang menjadi landasan hukum strategi nasional mempercepat pengurangan stunting (Nawangsari et al., 2023). Selanjutnya, mengingat stunting merupakan isu kesehatan krusial yang berdampak pada sektor pelayanan kesehatan, memerlukan perhatian serius dari penyelenggara pelayanan publik. Sejalan dengan pernyataan oleh Trianggirani & Wahyuni (2024), bahwa tanggung jawab pemerintah adalah memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang baik sebagai hak dasar.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, menjadikan penurunan stunting sebagai bagian dari program Transformasi Kesehatan Nasional. Fokus program ini adalah pada transformasi peningkatan layanan kesehatan primer, dengan tujuan memperbaiki promosi dan pencegahan dengan peningkatan gizi melalui posyandu dan teknologi kesehatan digital (Yulianto et al., 2025). Era digitalisasi telah masuk ke berbagai sektor, termasuk kesehatan. Digitalisasi membantu mengatasi masalah data dan meningkatkan integrasi layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengamankan penggunaan teknologi informasi dalam kesehatan (Sarmasih, 2025). Pemerintah berkomitmen mengatasi stunting pada balita dengan langkah strategis yang memanfaatkan teknologi sebagai instrumen pendukung. Stunting menjadi perhatian utama karena berdampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu kombinasi intervensi konvensional dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan stunting di berbagai daerah Indonesia (Abiyyah & Mursyidah, 2025).



Gambar 1.2 Prevalensi Stunting di Provinsi Jawa Timur
 Sumber: *Dashboard* Pemantauan Percepatan Pencegahan Stunting,
 Kemensetnag RI

Berdasarkan data dari survei nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Jawa Timur telah menurun secara signifikan dalam enam tahun terakhir, dari kategori “sangat tinggi” menjadi “rendah”. Pada tahun 2018, angka stunting mencapai 32,81% (kategori “sangat tinggi”), tahun 2022 menurun ke 19,20% (kategori rendah). Tren positif berlanjut dengan angka 17,70% pada 2023 dan mencapai 14,70% di tahun 2024, mempertahankan kategori rendah. Dengan adanya hal tersebut, tidak berarti usaha untuk menekan kasus stunting menjadi lebih lemah. Sebaliknya, ini menjadi langkah awal keoptimisan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus menggencarkan upaya penanganan kasus stunting serta mengontrol pertumbuhan populasi penduduk melalui jumlah pernikahan dan kelahiran. Apabila situasi tersebut tidak diimbangi dengan akses kesehatan yang mudah dan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai di setiap wilayah, baik di kota maupun di desa, maka dapat menjadi awal permasalahan kesehatan dan akan menghambat proses penyelesaian kasus stunting khususnya bagi ibu dan anak (Chrisanty, 2025).

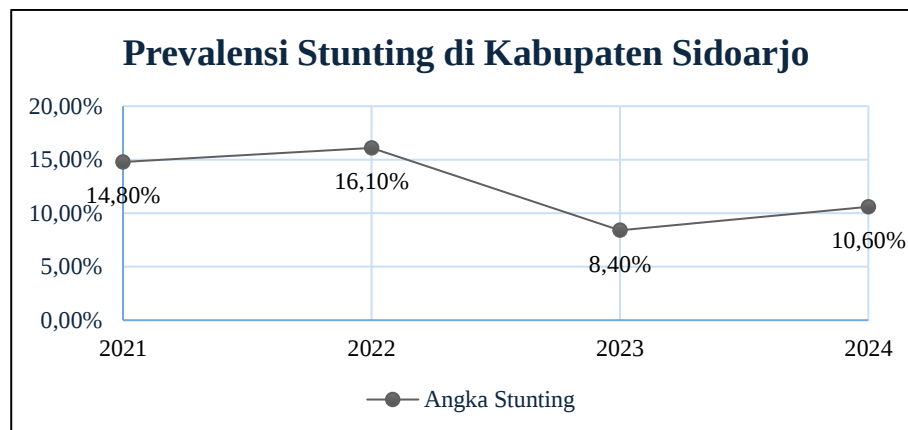
Informasi lebih lanjut tentang stunting dari Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

kemkes.go.id – “Butuh upaya lebih keras dan kerja sama erat, terutama di enam provinsi dengan jumlah balita stunting terbesar, yaitu Jawa Barat (638.000), Jawa Tengah (485.893), Jawa Timur (430.780), Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten. Kalau enam provinsi ini bisa kita turunkan 10%, maka secara nasional kita bisa turun 4–5%. Karena 50% anak stunting ada di enam daerah ini.” (Sumber : <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198> (diakses pada 6 November 2025))

Berdasarkan pernyataan di atas, menyebutkan bahwa memerlukan upaya lebih besar dan kerja sama lebih intensif, terutama di enam provinsi dengan jumlah balita stunting terbesar, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten. Menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur berada di posisi ketiga dengan jumlah kasus stunting terbesar.

Selain regulasi Perpres No. 72 tahun 2021, selanjutnya ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Kemendagri Nomor 050/4890/SJ tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, yang dijelaskan bahwa Kabupaten Sidoarjo termasuk salah satu area dengan masalah stunting. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menempatkan penanganan kasus stunting sebagai prioritas di berbagai desa yang tersebar di beberapa kecamatan (Izzuddin & Widiyarta, 2024). Di tingkat daerah, Kabupaten Sidoarjo, menjadi salah satu wilayah yang mengalami peningkatan jumlah kasus stunting yang menunjukkan bahwa langkah intervensi yang ada perlu diperkuat (Yulianto et al., 2025). Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya serta memiliki potensi besar untuk berkembang di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan infrastruktur. Namun, dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, kondisi stunting di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Sidoarjo tercatat sebesar 16,1%, lebih tinggi

dibandingkan Kabupaten Gresik sebesar 10,7% dan Kota Surabaya sebesar 4,8% di Jawa Timur. Data tersebut juga menunjukkan bahwa permasalahan stunting masih menjadi isu penting dan memerlukan penanganan serius di Kabupaten Sidoarjo (Elisandra et al., 2024).



Gambar 1.3 Tingkat Prevalensi Stunting di Kab. Sidoarjo Tahun 2021-2024
Sumber : Survei Status Gizi Indonesia yang telah diolah penulis, 2025

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan dinamika dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2023, menunjukkan hasil positif karena menurun. Namun pada 2024, kembali naik. Secara keseluruhan, prevalensi yang ada mengindikasikan adanya kemajuan dalam penanganan, meskipun masih diperlukan upaya intensif guna meneruskan keberlanjutan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana seperti yang diungkapkan oleh Djunawan et al. (2025), bahwa salah satu hal penting dalam memahami stunting adalah perkiraan tinggi atau panjang bayi untuk upaya pencegahan dan agar stunting tidak terus berlanjut. Guna menanggapi tingginya kasus stunting tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan

Penurunan Stunting Terintegrasi. Peraturan bupati tersebut mengatur percepatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, perbaikan gizi terpadu dan status gizi.

A NO	B KECAMATAN	C PUSKESMAS	D BALITA PENDEK (TBUI) STUNTING		E
			JUMLAH	%	
1	TARIK	TARIK	5	0,2	
		TARIK 2	7	0,4	
2	PRAMBON	PRAMBON	282	4,4	
3	KREMBUNG	KREMBUNG	234	3,9	
4	PORONG	PORONG	39	2,3	
5		KEDUNGSOLO	29	1,0	
6	JABON	JABON	235	6,3	
7	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	93	1,7	
8	CANDI	CANDI	497	6,2	
9		SIDODADI	51	1,4	
10	TULANGAN	TULANGAN	176	3,9	
11		KEPADANGAN	100	5,1	
12	WONOAYU	WONOAYU	133	3,5	
		WONOKASIAN	87	4,2	
13	SUKODONO	SUKODONO	308	3,3	
14	SIDOARJO	SIDOARJO	310	4,5	
15		URANGAGUNG	51	1,1	
16		SEKARDANGAN	88	4,3	
17	BUDURAN	BUDURAN	333	4,8	
18	SEDATI	SEDATI	119	1,5	
19	WARU	WARU	33	0,4	
20		MEDAENG	192	3,6	
		TAMBAKREJO	97	3,5	
21	GEDANGAN	GEDANGAN	156	2,7	
22		GANTING	403	8,8	
23	TAMAN	TAMAN	359	3,7	
24		TROSOBO	48	0,8	
25	KRIAN	KRIAN	73	1,1	
26		BARENGKRAJAN	57	1,8	
27	BALONGBENDO	BALONGBENDO	196	3,7	
JUMLAH (KAB)			4.743	3,17	

Gambar 1.4 Status Gizi Balita Menurut Puskesmas Sidoarjo 2023

Sumber : Dinas Kesehatan, 2026

Berdasarkan Data Status Gizi Balita Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Sidoarjo tahun 2023, prevalensi stunting bervariasi di setiap puskesmas. Wilayah dengan persentase balita stunting tinggi termasuk Puskesmas Ganting (8,8%), Puskesmas Jabon (6,3%), Puskesmas Candi (6,2%), Puskesmas Kepadangan (5,1%), dan Puskesmas Buduran (4,8%). Beberapa wilayah lainnya telah menunjukkan prevalensi yang lebih rendah, termasuk Puskesmas Porong, sebesar 2,3%. Berdasarkan data tahun 2023 tersebut, menunjukkan bahwa prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Porong relatif rendah dibandingkan beberapa wilayah lain di Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, data prevalensi stunting yang berasal dari Puskesmas Porong, pada tahun 2019 puskesmas ini

menunjukkan angka prevalensi stunting sebesar 28%. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi stunting Kabupaten Sidoarjo yang sebesar 23,9% kala itu. Salah satunya karena menjadi wilayah yang terdampak Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo mengakibatkan gangguan dalam akses layanan kesehatan yang dapat menyebabkan cakupan penimbangan bayi dan balita rendah. Berpotensi menyebabkan intervensi terlambat dan kurang optimal serta keterbatasan akses yang dapat menghambat penyampaian informasi, sehingga pemahaman kesehatan terbatas, begitu juga dalam persoalan stunting (Djunawan et al., 2025).

Puskesmas Porong menjadi layanan kesehatan primer utama sekaligus di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, sebagai unit yang berhadapan langsung dengan masyarakat serta turut bertanggung jawab atas penanggulangan masalah dan memfasilitasi layanan kesehatan di wilayahnya. Merespon kondisi darurat tingginya angka stunting saat itu dan mendukung penurunan prevalensi membutuhkan adanya inovasi, maka Puskesmas Porong menciptakan sebuah inovasi berupa Kompilasi Inovasi Porong Cegah dan Atasi Stunting (KOPI PAHIT). Berdasarkan pra-penelitian, pada tahun 2019-2020 inovasi KOPI PAHIT hadir sebagai gabungan dari berbagai layanan dan manajemen kasus yang masih beroperasi konvensional. Baik dalam pencatatan secara fisik, koordinasi langsung tatap muka antarprogram hingga kegiatan pendampingan lapangan yang belum didukung infrastruktur teknologi digital. Namun pada 2020, terjadi pandemi COVID-19, sehingga menghambat operasional penanganan, koordinasi, dan pengumpulan data terpengaruh oleh pembatasan mobilitas dan protokol kesehatan.

Pemerintah dituntut berinovasi dalam memberikan layanan kepada publik, salah satu yang dapat dilakukan ialah melalui *e-government* (Marwiyah, 2023). Inovasi dalam digitalisasi dan *e-government*, memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kinerja pemerintahan lebih efektif dan efisien, memudahkan tata kelola dengan teknologi. Tuntutan pemerintah yang bersih, transparan, dan mampu menjawab perubahan efektif yang diharapkan memenuhi kepentingan masyarakat (Hidayat et al., 2024). Penerapan *e-government* terus dikembangkan, dengan setiap daerah dan instansi pemerintah dengan khas dan kebutuhan masing-masing (Rahman & Taringan, 2020). Penerapan *e-government* adalah salah satu upaya pemerintah meningkatkan sistem pelayanan di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Dasar pelaksanaan *e-government* di Sidoarjo ialah dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2005. Untuk menerapkannya, memerlukan dukungan dari para pemimpin, adanya regulasi, anggaran, kapasitas kelembagaan sekaligus sumber daya manusia yang memadai (Kartika & Iskandar, 2021).

Masalah dan situasi darurat yang ada menunjukkan perlunya layanan yang lebih responsif. Pada 2021, tim kesehatan Puskesmas Porong bertransformasi ke sistem digital untuk penanganan stunting sesuai kebijakan. Hal ini melahirkan pengembangan KOPI PAHIT dalam format aplikasi digital KOPI PAHIT yang diluncurkan pada 2022, mengubah cara konvensional menjadi sistem yang lebih terintegrasi. Hal tersebut, menunjukkan bahwa *e-government* dapat menjadi upaya dan solusi atas terhambatnya akses pelayanan saat itu agar dapat tetap berjalan dan bermanfaat. Adanya aplikasi ini juga merupakan wujud pembaruan intervensi

stunting yang lebih spesifik, mendukung program pencegahan dan penanganan stunting dengan metode yang sistematis dan berkelanjutan.

Tabel 1.1 Tingkat Prevalensi Stunting di Puskesmas Porong

Tahun	Tingkat Stunting (%)
2019	28
2020	10,8
2021	10
2022	3,61
2023	1,9
2024	1,63
2025	1

Sumber : Puskesmas Porong, 2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan tingkat prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Porong mengalami tren penurunan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Tahun 2019 menjadi tahun dengan tingkat yang relatif tinggi, hingga selanjutnya tingkat prevalensi mengalami penurunan secara konsisten hingga tahun 2025. Namun terjadinya penurunan tingkat prevalensi tersebut belum menjamin masalah terkait stunting terselesaikan sepenuhnya, sehingga tetap memerlukan kewaspadaan yang berkelanjutan guna mempertahankan tingkat stunting yang rendah di wilayah Kecamatan Porong. Sebagaimana penelitian oleh Baroroh & Wibawani (2025), meskipun Puskesmas Porong menemukan peluang mempercepat pengurangan stunting dengan program yang inovatif serta menjalin kolaborasi antar sektor. Namun masih terdapat tantangan, yakni perubahan perilaku masyarakat, akses makanan bergizi, keterbatasan sumber daya manusia dan pelaksanaan pemantauan program yang belum optimal.



Gambar 1.5 Beranda Aplikasi KOPI PAHIT

Sumber : Aplikasi KOPI PAHIT, 2025

Berdasarkan gambar 1.5 di atas, dapat ditunjukkan bahwa Aplikasi KOPI PAHIT menyediakan beragam fitur layanan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Fitur yang tersedia berupa fitur skrining data balita, konsultasi dengan tenaga kesehatan puskesmas, informasi dan edukasi seputar kesehatan yakni stunting, disertai kuis, informasi berbagai puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan survei kepuasan layanan yang dapat diakses secara praktis dalam satu genggam. Dilansir dari laman SETIA (Sistem Riset dan Inovasi Daerah) www.setia.sidoarjokab.go.id, aplikasi KOPI PAHIT memudahkan masyarakat dan tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Porong untuk mendapatkan data status gizi balita melalui fitur *screening* kesehatan yang diakses dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja (Bappedalitbang Sidoarjo, 2021).

Tabel 1.2 Data Jumlah Balita yang Diinput di Aplikasi KOPI PAHIT

Tahun	Jumlah Balita yang Diinput
2022	1.148
2023	1.073
2024	2.112

Sumber : Puskesmas Porong, 2025

Berdasarkan data tersebut, penggunaan aplikasi KOPI PAHIT menunjukkan dinamika selama penerapannya dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun awal penerapannya, tercatat jumlah yang cukup besar hingga mengalami peningkatan yang positif pada 2024. Selain itu, informasi pada *Google Play Store* menunjukkan bahwa aplikasi ini telah diunduh lebih dari 1000 kali, akan tetapi, data unduhan ini tidak mencerminkan jumlah pengguna yang aktif maupun tingkat frekuensi pemakaian Aplikasi KOPI PAHIT dalam praktik pelayanan sehari-hari.

Guna mendukung implementasi KOPI PAHIT, dilakukan kolaborasi oleh Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo dan puskesmas di Sidoarjo serta sinergi lintas sektor. Setelah aplikasi KOPI PAHIT diluncurkan, intervensi terhadap stunting dapat dilakukan dengan lebih terfokus. Orang tua dan kader kesehatan, pengumpulan data tentang berat dan tinggi badan dapat dilakukan secara mandiri (Baroroh & Wibawani, 2025b). Aplikasi KOPI PAHIT telah memberikan manfaat karena mempermudah proses pelaporan dan pemantauan serta informasi dapat diakses secara langsung. Penggunaannya dianggap positif karena membantu nakes memantau status gizi balita dan memberikan intervensi yang lebih tepat sasaran (Abiyyah & Mursyidah, 2025). Setelah adanya inovasi KOPI PAHIT di Puskesmas Porong, angka stunting dilaporkan turun, seperti yang dibuktikan dengan tabel 1.1 prevalensi stunting yang telah ditunjukkan sebelumnya. Pada 2023, KOPI PAHIT meraih Top 99 Inovasi Publik dari Kemenpan RB. Aplikasi ini juga didukung untuk direplikasi ke puskesmas lain di Kabupaten Sidoarjo (KemenPANRB, 2024).

Aplikasi KOPI PAHIT mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menerapkan di puskesmas lain di Sidoarjo. Kini replikasi telah dijalankan pada 31

Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo, menjadi instrumen penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data pra-penelitian. Aplikasi KOPI PAHIT turut menjadi wujud SPBE dan digitalisasi di Kabupaten Sidoarjo sejalan dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sidoarjo 2021-2026, mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keberadaan aplikasi ini berpotensi memberikan manfaat melalui kemudahan akses, percepatan input data dan analisis, layanan konsultasi dan edukasi gizi secara *online*. Dengan demikian, KOPI PAHIT dapat dipandang menjadi salah satu wujud inovasi digital yang mendukung penciptaan *public value* dalam layanan kesehatan melalui akses terhadap informasi, identifikasi dan intervensi terkait stunting.

Berdasarkan pra-penelitian, masih terdapat tantangan dan kesenjangan yang terjadi. Pertama, input data yang bervariasi karena tidak konsisten antarpetugas/antarwilayah. Kedua, keterbatasan literasi digital masyarakat karena tidak semua dengan mudah lancar memahami aplikasi atau teknologi. Ketiga, walaupun aplikasi dirancang untuk mempermudah akses, tetapi masih adanya gangguan koneksi internet. Keempat, adanya pergantian sumber daya manusia/petugas dan kelima, kolaborasi lintas sektor yang diharapkan kuat namun belum sepenuhnya merata. Tantangan tersebut sejalan dalam penelitian terdahulu oleh Abiyyah & Mursyidah (2025), menunjukkan bahwa Aplikasi KOPI PAHIT efektif dan sudah berjalan baik, namun masih terdapat keterbatasan, mulai dari akses internet yang tidak merata, rendahnya literasi digital hingga keakuratan

pengukuran tinggi badan oleh kader posyandu dan orang tua. Untuk meminimalisir keterbatasan, puskesmas tetap mendampingi dan membina kader dan masyarakat.

Kebutuhan warga akan layanan yang cepat dan mudah diakses semakin meningkat seiring kompleksitas kesejahteraan serta tingginya mobilitas sosial. Digitalisasi layanan muncul sebagai respons terhadap hal ini. Namun, pada kenyataannya terdapat risiko kesenjangan baru karena tidak semua warga memiliki literasi digital, akses internet, dan perangkat teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital perlu dianalisis kritis dalam konteks keadilan karena turut timbul suatu konsekuensi (Nugraha et al., 2025). Kebijakan dapat dibuat sesuai kondisi dan mempertimbangkan permasalahan yang ada. Kebijakan harus memiliki nilai publik yang baik agar tidak menimbulkan masalah dan mudah diterima masyarakat (Novianti et al., 2024). Konsep nilai publik yang dapat bermanfaat dan memiliki syarat dapat dipikirkan para pengelola publik jika mengintegrasikan terhadap penilaian substantif terkait apa yang akan efektif dan berharga, diagnosis ekspektasi politik dan perkiraan realistis mengenai apa yang layak secara operasional. Ketika memikirkan nilai publik, para pengelola perlu mencari cara untuk mengintegrasikan politik, substansi, dan administrasi (Moore, 1995).

Konsep nilai publik berfungsi sebagai kerangka evaluatif dalam menilai kinerja kebijakan, lembaga publik dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan pengembangan sistem pelayanan. Pemanfaatan TIK menjadi instrumen penting untuk mentransformasikan hubungan internal maupun eksternal pemerintah. Pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik di tengah dinamika perkembangan menuntut orientasi yang kuat diperlukan nilai

publik (Saffrialdi & Setijaningrum, 2024). Meskipun legitimasi hukum dan penerapan teknologi penting, tetapi tidak cukup tanpa kapasitas organisasi dan fokus pelayanan pada kebutuhan masyarakat. *Public value* dalam layanan digital tidak hanya dari kepatuhan regulasi dan penggunaan teknologi. Moore menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara tujuan kebijakan, kapasitas organisasi, dan dukungan publik (Nugraha et al., 2025).

Kesenjangan dan berbagai tantangan yang masih ada dalam pelaksanaan layanan aplikasi KOPI PAHIT, menjadi penting diteliti karena keberadaan *public value* dan keberhasilan *e-government* ditentukan oleh teknologi, operasional layanan dan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Layanan inovasi digital ini diharapkan tidak hanya mencapai target program, tetapi juga menghasilkan nilai publik yang nyata dan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, belum menjamin semua nilai yang diharapkan dapat tercapai dengan mudah. Oleh karena itu, upaya Puskesmas Porong dalam memberikan layanan kesehatan melalui aplikasi tersebut perlu dikaji untuk mendalami nilai publik yang konkret bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Moore menekan bahwa manajer publik untuk memperhatikan ke atas lingkungan politik yang memberikan wewenang dan menyediakan sumber daya, serta menilai dari hasil yang mereka capai, dan juga melihat ke luar menuju lingkungan tugas di mana usaha mereka untuk menciptakan *public value* bagi masyarakat akan berhasil atau gagal (Moore, 2013). *Public value* semakin kuat jika dilakukan dengan kolaboratif dan fokus pada manfaat sosial yang berkelanjutan. Dukungan sosial penting untuk keberlanjutan, peningkatan kapasitas aparatur, dan transparansi dengan teknologi digital dan

penguatan kelembagaan serta sistem partisipasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik (Nurdianti et al., 2025).

Penelitian oleh Eka Azhar Abiyyah & Lailul Mursyidah (2025). “*The Effectiveness of the KOPI PAHIT Application in Stunting Prevention Efforts in the Porong Community Health Center Work Area*”, berfokus pada efektivitas Aplikasi KOPI PAHIT dalam upaya pencegahan stunting di Puskesmas Porong. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi ini meningkatkan efektivitas layanan berdasarkan teori Campbell. Menyoroti peran aplikasi dalam layanan kesehatan dapat mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi stunting dan dapat menjadi model yang direplikasi puskesmas lain. Menekankan pentingnya teknologi, kebijakan kesehatan, dan partisipasi masyarakat, meski efektif, masih menghadapi keterbatasan. Sementara itu, penelitian ini menganalisis layanan kesehatan melalui Aplikasi KOPI PAHIT menciptakan nilai publik menggunakan kerangka Strategic Triangle dari Mark Harrison Moore untuk memberikan perspektif mendalam mengenai penciptaan nilai publik dalam inovasi layanan kesehatan.

Berdasarkan penelitian yang relevan, sebagian besar menyorot hasil yang belum mendetail pada nilai publik dari layanan kesehatan stunting menggunakan aplikasi di tingkat puskesmas yang terlebih sebagai inisiator. Isu kesehatan stunting masih krusial baik di tingkat nasional maupun lokal, belum terdapat penelitian spesifik yang menggunakan pendekatan *public value* pada layanan dengan menggunakan aplikasi KOPI PAHIT Puskesmas Porong, yang sebagaimana dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan. Penelitian ini untuk mengisi celah dan mendalami nilai publik dari layanan kesehatan digital puskesmas, yakni Aplikasi

KOPI PAHIT yang berkontribusi positif di wilayah kerja Puskesmas Porong. Diharapkan hasil pemetaan akan dapat mengidentifikasi aspek layanan yang baik dan yang perlu diperbaiki, serta menjadi bahan rujukan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang inovatif secara teknologi, mudah diakses, dan berdampak nyata dalam merespon masalah kesehatan di wilayah Porong.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada *public value* dari layanan melalui Aplikasi KOPI PAHIT dalam pengelolaan layanan bagi publik sejauh mana menghasilkan manfaat terhadap kebutuhan masyarakat, menjawab kekurangan pada layanan serta menumbuhkan kepercayaan. Penelitian ini menggunakan Teori *Public Value* dalam Segitiga Strategis oleh Moore (2013) sebagai pisau analisis yang terdiri dari tiga elemen, yakni *Legitimacy and Support*, *Operational Capacity* dan *Substantively Valuable*. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat topik tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul "*Public Value* dalam Layanan Kesehatan Melalui Aplikasi KOPI PAHIT (Kompilasi Porong Cegah dan Atasi Stunting) di Puskesmas Porong Kabupaten Sidoarjo".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang menjadi pembahasan di penelitian ini yaitu “Bagaimana *Public Value* dalam Layanan Kesehatan Melalui Aplikasi KOPI PAHIT (Kompilasi Inovasi Porong Cegah dan Atasi Stunting) di Puskesmas Porong Kabupaten Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *Public Value* dalam Layanan Kesehatan Melalui

Aplikasi KOPI PAHIT (Kompilasi Inovasi Porong Cegah dan Atasi Stunting) di Puskesmas Porong Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik bagi peneliti maupun pihak-pihak yang memiliki kaitan. Berikut manfaat yang diharapkan yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta referensi sejenis dalam kajian Administrasi Publik tentang *public value* dari inovasi digital pada layanan kesehatan, khususnya terkait Aplikasi KOPI PAHIT Puskesmas Porong.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan lebih luas bagi peneliti terkait pelayanan publik dalam sektor kesehatan terhadap perkembangan pemanfaatan *e-government*.

b. Puskesmas Porong

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan terhadap Aplikasi KOPI PAHIT sebagai landasan pengembangan lebih lanjut untuk terus mencapai tujuannya.

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diharapkan menjadi tambahan bacaan bagi perpustakaan dan program studi serta literatur bagi penelitian sejenis di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.